

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
MITIGASI BENCANA ALAM KEKERINGAN DI KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dwiki Nuril Firdaus

NPP. 30.0792

Asdaf Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: dwikinurilf@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Muslim, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In this study, the author focuses on how the Regional Disaster Management Agency of Sumenep Regency in mitigating drought natural disasters where these drought natural disasters have received less public attention. **Objective:** To find out the Strategy of the Disaster Management Agency in Mitigating Drought Natural Disasters in Sumenep Regency, East Java Province, Inhibiting Factors of the Regional Disaster Management Agency in Implementing Drought Natural Disaster Mitigation Strategies in Sumenep Regency, and the Efforts of the Regional Disaster Management Agency of Sumenep Regency in Facing Obstacles in the Implementation of Drought Natural Disaster Mitigation Strategies. **Methodology:** This study uses a qualitative descriptive approach and inductive data analysis through access to data obtained from interviews, observations, and documentation. **Results/Findings:** The findings of this study are that the strategy of the Regional Disaster Management Agency of Sumenep Regency is quite good but needs to be improved further. The most important inhibiting factor in implementing strategies for drought natural disaster mitigation is resources. Regarding the efforts made by the Regional Disaster Management Agency of Sumenep Regency can be said to be right on target, but it is necessary to pay attention to what is the priority in order to overcome disasters. **Conclusion:** The strategy of the Regional Disaster Management Agency in Mitigating Drought Natural Disasters in Sumenep Regency, East Java Province, is good enough to produce a disaster-based public service which includes government functions in the protection aspect. There are several things that need to be considered, improved, and improved in order to achieve the main tasks and functions of BPBD Sumenep Regency to run better.

Keywords : Strategy, Mitigation, Drought

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam mitigasi bencana alam kekeringan yang di mana bencana alam kekeringan ini kurang mendapatkan perhatian publik. **Tujuan:** Untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Dalam Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Faktor Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menerapkan Strategi Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumenep, dan Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam Menghadapi Hambatan Penerapan Strategi Mitigasi Bencana Alam Kekeringan. **Metodologi:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data secara induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan dari penelitian ini yaitu strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep cukup baik namun, perlu ditingkatkan lebih lanjut. Faktor penghambat yang paling utama dalam menerapkan strategi untuk mitigasi bencana alam kekeringan yaitu sumber daya. Terkait Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dapat dikatakan tepat sasaran, akan tetapi perlu diperhatikan kembali apa yang menjadi prioritas dalam rangka menanggulangi bencana. **Kesimpulan:** Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik sehingga menghasilkan sebuah pelayanan publik berbasis penanggulangan bencana yang di mana hal tersebut termasuk fungsi pemerintahan pada aspek perlindungan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, ditingkatkan, serta diperbaiki guna tercapainya tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sumenep berjalan dengan lebih baik.

Kata kunci : Strategi, Mitigasi, Kekeringan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang unik dengan keanekaragaman etnik yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam baik flora maupun fauna. Namun, Indonesia juga menghadapi ancaman risiko bencana yang serius. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia di daerah beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang ekstrem dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi dan meteorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sering menjadi headline di media karena potensi bencana yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tujuan dari pembentukan badan-badan ini adalah untuk memudahkan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan catatan BNPB pada tahun 2021, Bulan Januari hingga Bulan Desember total kejadian bencana sebanyak 2.723 kejadian. Bencana yang melanda Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan meteorologi yang di antaranya Gempa Bumi, Erupsi Gunung Api, Karhutla, Kekeringan, Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, dan Gelombang Pasang serta Abrasi. Variabilitas iklim yang tinggi menyebabkan adanya kejadian ekstrem basah dan ekstrem kering. Saat terjadi ekstrem basah, maka potensi terjadinya bencana banjir dan longsor meningkat, begitu pun sebaliknya, apabila terjadi ekstrem kering, maka potensi kemarau berkepanjangan akan cukup besar. Bencana alam akibat variabilitas hujan ekstrem yang banyak terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian material dan non-material, contohnya adalah kemarau panjang yang disebut dengan bencana alam kekeringan. Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat terdapat 130 desa di berbagai daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan setiap tahunnya. Desa yang mengalami kemarau tersebar di wilayah Tuban, Pacitan, Ponorogo, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Nganjuk, Jombang, Trenggalek, Banyuwangi, Mojokerto, dan Bojonegoro. Bencana alam kekeringan ini tidak kalah berbahayanya dibandingkan bencana alam lainnya, dampak dari bencana alam kekeringan secara umum yaitu, penurunan ekonomi karena lahan pertanian yang mati, hewan dan tumbuhan mati, sehingga penghasilan perekonomian otomatis menurun.

Kabupaten Sumenep menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang masih dilanda bencana alam kekeringan hingga tahun 2022, Hampir setiap tahun, beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumenep mengalami kekurangan air bersih di musim kemarau hal ini terjadi pada periode tahun 2018 s.d. 2021, informasi tersebut diperoleh dari beberapa media informasi yang di mana pada periode tahun 2018 s.d. 2021 mempublikasikan berita bahwasanya beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumenep mengalami kekeringan yang berdampak kekurangan air bersih. Dilansir dari salah satu website yaitu sumenepkab.go.id website dari Pemerintah Kabupaten Sumenep pada musim kemarau tahun 2022, Kabupaten Sumenep kembali dilanda kekeringan, bencana alam kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep mengakibatkan masyarakat mengalami kekurangan air bersih. BPBD Kabupaten Sumenep mengategorikan bencana alam kekeringan tersebut dengan kategori kering kritis dan kering langka. Kering kritis yaitu persediaan air masyarakat per hari kurang dari 10 liter dan untuk mencari atau mengambil air perlu menempuh jarak lebih dari 3 kilometer, sedangkan kering langka persediaan air masyarakat per hari hanya 10-30 liter dan untuk mencari atau mengambil air harus menempuh dengan jarak 0,5-3,0 kilometer. Penanggulangan yang dilakukan BPBD Kabupaten Sumenep pada saat itu, hanya melakukan pendistribusian air bersih ke setiap desa yang mengalami bencana alam kekeringan di Kabupaten Sumenep.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, diperlukan strategi yang tepat. Mitigasi perlu ditingkatkan sejak dini untuk mengurangi dampak bencana, terutama kekeringan yang dapat meluas ke seluruh wilayah. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana juga perlu dipersiapkan. Penanganan yang tepat akan membantu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar bencana kekeringan dapat diatasi. Kabupaten Sumenep, yang termasuk daerah rawan bencana, perlu memiliki strategi mitigasi yang baik dan optimal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana kekeringan pada musim kemarau, sehingga kehidupan masyarakat dapat aman dari ancaman bencana alam tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam kekeringan yaitu, bencana alam kekeringan ini kurang mendapatkan perhatian dari publik, hal tersebut dikarenakan kekeringan sering kali dianggap sebagai bencana alam yang lebih lambat berkembang dibandingkan dengan bencana alam lainnya seperti banjir atau gempa bumi. Dampaknya tidak langsung terlihat secara dramatis, sehingga sering kali tidak diperlakukan sebagai ancaman yang mendesak. Kurangnya persepsi akan urgensi kekeringan membuat perhatian terhadap bencana ini kurang memadai. Kadang-kadang, bencana-bencana alam lainnya seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi memperoleh prioritas yang lebih tinggi dalam perhatian pemerintah dan publik. Hal ini mungkin karena dampak yang lebih langsung terlihat atau media yang lebih banyak meliputnya. Akibatnya, bencana alam kekeringan cenderung kurang diperhatikan. Kesadaran masyarakat mengenai kekeringan sering kali rendah, terutama di daerah yang jarang mengalaminya secara langsung. Pendidikan dan informasi yang cukup mengenai kekeringan serta dampaknya tidak selalu tersedia, sehingga membuat masyarakat kurang peka dan tidak memprioritaskan penanganan kekeringan. Selain itu, kekeringan sering kali menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk ditangani. Penyebab kekeringan bisa bervariasi, termasuk faktor alam, perubahan iklim, dan praktik manusia. Memperbaiki masalah kekeringan memerlukan pendekatan yang holistik dan jangka panjang, yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Hal ini bisa membuat penanganan kekeringan menjadi lebih sulit dan kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Maka dari itu penting untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, dan pemahaman mengenai kekeringan serta pentingnya penanganan yang tepat. Hal ini termasuk mengintegrasikan kekeringan dalam perencanaan bencana dan kebijakan pembangunan, serta mempromosikan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait untuk mengatasi masalah kekeringan secara efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Manfaat menggunakan penelitian sebelumnya adalah menyediakan kerangka kerja untuk penelitian dan perbandingan, selain itu juga dapat membantu dalam mengetahui persamaan dan perbedaan signifikan yang dibuat oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini terinspirasi dengan beberapa penelitian sebelumnya dalam rangka menanggulangi bencana alam kekeringan. Pertama oleh Samuel Sutanto tahun 2017 *Wawasan Mengenai Sistem Peringatan Dini Kekeringan di Indonesia*. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan cara menghitung tingkat kekeringan di masa yang akan datang melalui algoritma-algoritma sehingga dapat mengetahui daerah rawan kekeringan 7 bulan ke depan dan indeks kekeringan yang akan terjadi. Penelitian kedua, *Analisis Kesiapsiagaan Siswa Dalam Menghadapi Bencana Kekeringan Melalui Media Booklet* oleh Fajar Wulandari tahun 2019. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwasanya pembelajaran yang menggunakan media

booklet kepada siswa SMA efektif dan layak digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, serta terbukti dapat meningkatkan serta mempengaruhi kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana alam. Selanjutnya penelitian ketiga oleh Dwi Hastuti, Sarwono, Chatarina Muryani tahun 2017 *Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bahaya Kekeringan Kabupaten Grobogan*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tindakan yang dilakukan di Kabupaten Grobogan antara lain mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah yaitu dengan pembuatan embung, sumur resapan, sumur bor, tandon air, reboisasi, dan perbaikan saluran irigasi. Pemerintah juga melakukan sosialisasi dan program sanitasi terkait mitigasi kekeringan. Kemudian adaptasi masyarakat dalam menghadapi kekeringan yaitu dengan penggunaan air yang efisien, penyediaan alokasi dana untuk air bersih dari swasta, pola tanam, serta menjaga kesehatan dan siap sedia obat-obatan untuk menghadapi penyakit akibat musim kemarau (kekeringan). Dalam implementasinya, Tim ahli, guru geografi dan siswa SMA di Kabupaten Grobogan merespon bahwasanya modul pembelajaran terkait kontekstual mitigasi dan strategi adaptasi kekeringan ini layak untuk pembelajaran dalam materi mitigasi bencana mata pelajaran geografi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu selain untuk mengetahui bagaimana menanggulangi bencana alam kekeringan melalui strategi mitigasi, pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam mitigasi bencana alam kekeringan serta mengetahui bagaimana upayanya dalam menghadapi faktor penghambat tersebut. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis menggunakan pendapat dari Jhon M. Bryson (2005:189) bahwasanya strategi dapat dianggap sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, alokasi sumber daya, dan keputusan, dengan teori tersebut penulis dapat mengetahui strategi BPBD Kabupaten Sumenep dalam mitigasi bencana alam kekeringan. Terkait dengan adanya faktor penghambat penulis mengelompokkan faktor penghambat ke dalam 2 (dua) jenis yaitu, hambatan internal dan eksternal, sedangkan untuk upaya sendiri penulis juga mengelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis upaya yaitu struktural, upaya non struktural, dan upaya kelembagaan.

1.5 Tujuan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang pertama, untuk mengetahui strategi BPBD dalam mitigasi bencana alam kekeringan di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, kedua untuk mengetahui faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam menerapkan strategi mitigasi penanggulangan bencana alam kekeringan. Dan untuk mengetahui upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam menghadapi hambatan penerapan strategi mitigasi bencana alam kekeringan.

II. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data secara induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Definisi penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2014:7) penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam memahami fenomena dari subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah. Untuk memperoleh data secara aktual guna mendukung proses pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini, Sugiyono (2017:224) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam melaksanakan penelitian karena tujuan utama dari suatu penelitian yakni untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang

informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep, Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumenep, serta 2 (dua) orang warga yang bertempat tinggal di wilayah kekeringan. Selain itu dalam pengumpulan data dokumentasi penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, laporan hasil kerja BPBD, Arsip BPBD, serta gambar/ foto yang berkaitan dengan penanggulangan bencana kekeringan. Penulis juga melakukan observasi terhadap kondisi beberapa wilayah kekeringan di Kabupaten Sumenep. Adapun beberapa cara analisis data dengan menggunakan 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis menganalisis strategi badan penanggulangan bencana dalam rangka mitigasi bencana alam kekeringan di Kabupaten Sumenep melalui teori strategi Jhon M. Bryson bahwasanya strategi dapat dilihat dari pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, alokasi sumber daya, dan keputusan.

3.1 Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur

a. Pola Tujuan

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terkait pola tujuan BPBD Kabupaten Sumenep dalam mitigasi bencana alam kekeringan dapat dikatakan cukup baik dikarenakan dalam mengupayakan terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kabupaten Sumenep, BPBD Kabupaten Sumenep menciptakan moto yang juga sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sumenep dan mengimplementasikannya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

b. Kebijakan

Terkait kebijakan dalam strategi BPBD Kabupaten dalam mitigasi bencana alam kekeringan, BPBD Kabupaten Sumenep telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana dengan mengambil kebijakan untuk melakukan koordinasi yang terpadu dan menyeluruh untuk menanggulangi bencana alam kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Implementasi tersebut dapat dikatakan cukup efektif karena untuk menanggulangi bencana alam kekeringan ini memerlukan campur tangan oleh berbagai pihak agar masalah dapat diselesaikan tepat sasaran.

c. Program

Program kesiapsiagaan yang menjadi skala prioritas BPBD Kabupaten Sumenep dalam mitigasi bencana alam kekeringan yaitu desa tangguh desa tangguh bencana (DESTANA) dan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) di dalam dua (2) program tersebut BPBD Kabupaten Sumenep mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menghindari dan mengurangi dampak dari risiko bencana alam kekeringan dengan cara penanam pohon kembali, pencarian sumber mata air, tidak menebang pohon sembarangan, dan penggunaan air bersih yang efektif. Terkait strategi BPBD dalam mitigasi bencana alam kekeringan dengan cara melaksanakan kedua program tersebut tentu masyarakat yang dapat memberikan penilaian apakah program tersebut efektif atau tidaknya. Akan tetapi setidaknya BPBD memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat supaya masyarakat itu sendiri paham dan sadar terhadap pentingnya mitigasi bencana dan kedua program tersebut harus dilaksanakan secara rutin supaya masyarakat terbiasa akan kesiapsiagaan dan tidak panik ketika sudah waktunya musim kemarau.

d. Tindakan

Tindakan kedaruratan yang dilakukan BPBD Kabupaten Sumenep dalam mitigasi bencana alam kekeringan yaitu, dengan melakukan identifikasi wilayah kekeringan yang kemudian menetapkan status wilayah tersebut ke dalam dua (2) kategori yaitu kering kritis dan kering langka. Setelah itu BPBD berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendistribusian air bersih ke seluruh wilayah yang terdampak bencana alam kekeringan. Tindakan tersebut dapat dikatakan cukup efektif untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang tindakan tersebut sangat tidak efektif dikarenakan dapat menguras anggaran yang lebih banyak, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi defisit anggaran.

e. Alokasi Sumber Daya

Terkait mitigasi bencana alam kekeringan mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Sumenep ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki masih memadai. Dilihat dari posisi kantor BPBD yang strategis, kondisi ini dapat memudahkan BPBD dalam melakukan tindakan pengendalian operasional. Namun untuk dikatakan memadai sepenuhnya tidak cukup, karena faktor usia peralatan dan jumlah yang kurang memadai, ada beberapa peralatan yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Melihat wilayah dan jumlah yang terdampak bencana kekeringan cukup luas dan banyak, hal tersebut dapat menghambat proses penanggulangan bencana alam kekeringan. Selain sarana dan prasarana, dalam rangka mitigasi bencana alam kekeringan sumber daya manusia juga menjadi peran penting dalam hal tersebut. kesiapan sumber daya aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya siap untuk mitigasi bencana alam kekeringan. Dari hasil observasi penulis, untuk keterampilan dan pengalaman sumber daya aparatur BPBD dalam pengkajian bencana kekeringan masih kurang optimal, karena tidak adanya tenaga ahli bidang meteorologi dan hidrologi dan tenaga ahli bidang IT yang piawai dalam penggunaan teknologi untuk pengkajian risiko bencana kekeringan, pemetaan wilayah kekeringan, dan sistem informasi untuk menyebar luaskan informasi terkait bencana kekeringan atau bencana lainnya. Perencanaan anggaran merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini bertujuan keberlangsungan operasional kegiatan berjalan dengan lancar, perencanaan anggaran yang baik sangat penting bagi BPBD dalam menjalankan tugas-tugas penanggulangan bencana. Hal ini akan memastikan bahwa BPBD dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien dalam menghadapi bencana serta meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat. Perencanaan anggaran yang dilakukan BPBD Kabupaten Sumenep belum tepat karena perencanaan anggaran yang dilakukan hanya berfokus pada kegiatan program DESTANA, SPAB, Pembangunan dan Perawatan embung serta pendistribusian air, sedangkan terkait perencanaan anggaran untuk pembaharuan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan pengadaan barang logistik belum dilaksanakan hal inilah yang dapat menghambat proses berjalannya mitigasi bencana alam kekeringan. Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan BPBD hanya berfokus hanya dalam jangka pendek. Sedangkan untuk melakukan perencanaan anggaran dalam pembaharuan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, dan barang logistik belum dilaksanakan, hal ini dikarenakan BPBD tidak hanya berfokus pada bencana kekeringan saja, namun masih ada penanggulangan bencana lainnya yang harus dilakukan salah satunya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak dari bencana tanah longsor dan angin puting beling yang menyebabkan banyak rumah warga mengalami kerusakan.

f. Keputusan

Keputusan yang diambil oleh BPBD Kabupaten Sumenep dalam rangka mitigasi bencana alam kekeringan tepat sesuai sasaran. Dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, secara tidak langsung hal ini menjadi faktor pendukung terwujudnya visi Kabupaten Sumenep.

3.2 Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menerapkan Strategi Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumenep

a. Hambatan Internal

Komunikasi internal BPBD Kabupaten Sumenep belum optimal seperti yang dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep. Pada kesempatan saat itu penulis menemukan adanya saling lempar melempar dalam melaksanakan tugas dengan alasan masing-masing anggota masih memiliki tugas yang belum terselesaikan. Selain itu, penulis menemukan kurangnya pemahaman dan kesadaran anggota mengenai pentingnya koordinasi dalam penanggulangan bencana, hal ini menyebabkan lambatnya respons dari anggota BPBD sehingga koordinasi tidak berjalan dengan lancar dan menghambat tercapainya tujuan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, ditemukan banyak peralatan kebencanaan yang tidak terawat dikarenakan kurangnya pemeliharaan. Peralatan kebencanaan seperti kapal boat, pelampung, dan perahu karet terlihat beberapa terbenkakai, selain itu terkhusus dalam peralatan dalam mitigasi bencana kekeringan seperti, peralatan mesin generator air dan selang air sudah lawas dan terdapat beberapa peralatan yang sudah rusak, kemungkinan hanya ada 2 (dua) mesin generator air dan 1 (satu) selang yang masih layak digunakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana untuk pemeliharaan dan pembaharuan serta kapasitas gudang yang kecil yang tidak muat digunakan untuk menyimpan peralatan besar dan banyak. Selain itu, tidak adanya penyaluran bantuan logistik seperti sembako atau obat-obatan kepada masyarakat. Dalam situasi kekeringan makanan dan obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menghindari timbulnya berbagai macam penyakit. Terkait sumber daya aparatur, BPBD Kabupaten Sumenep kekurangan sumber daya aparatur yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam penggunaan teknologi yang mumpuni untuk pengkajian bencana. Selain itu tingkat kesadaran dan kepedulian sumber daya aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana masih kurang. Hal ini disebabkan banyaknya pegawai-pegawai yang bermasalah di mutasi ke BPBD, dalam rangka penanggulangan bencana action di lapangan BPBD bergantung kepada relawan-relawan yang ada. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur ini yang menyebabkan perencanaan anggaran tidak tepat sasaran.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan yang sering dialami BPBD dalam hal pelaksanaan penanggulangan bencana pada umumnya yaitu disebabkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu lancarnya dan terwujudnya penanggulangan bencana yang tepat sesuai sasaran. Tingkat kepartisipasian dan kepedulian masyarakat dalam mendukung strategi BPBD sangat kurang. Masyarakat menganggap program BPBD dalam menciptakan masyarakat yang tangguh bencana tidak terlalu penting dalam mitigasi bencana alam kekeringan. Hal ini disebabkan adanya bantuan air bersih setiap tahunnya oleh pemerintah. Selain itu, perbedaan persepsi masyarakat menjadi penyebab utama rasa ketidaksadaran dan ketidakpedulian masyarakat itu muncul. Masyarakat masih melakukan penebangan pohon secara terus menerus untuk dijadikan sumber penghasilan mereka ataupun kebutuhan properti pribadi, sementara itu tindakan tersebut dapat menyebabkan wilayah menjadi gersang dan sumber air berkurang.

Di samping itu, masyarakat memanfaatkan program kegiatan DESTANA untuk memperoleh insentif atau imbalan, apabila dalam kegiatan program DESTANA tersebut tidak ada imbalan bagi masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan dari program DESTANA tersebut. Selain masyarakat, hambatan yang terlepas dari kendala BPBD dan sering dialami pada pelaksanaan penanggulangan bencana disebabkan oleh faktor wilayah. Kondisi wilayah yang tidak baik dapat menyebabkan pelaksanaan mitigasi bencana alam kekeringan terhambat, seperti misalnya kondisi struktur tanah, wilayah yang terpencil sehingga sulit dijangkau. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumenep dan salah satu warga Kecamatan Batuputih, kecamatan yang hampir seluruh wilayahnya mengalami kekeringan, penulis mendapatkan informasi tentang gambaran kondisi wilayah Kabupaten Sumenep yang mengalami kekeringan.

Luasnya wilayah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Sumenep menyebabkan BPBD kewalahan dalam melaksanakan mitigasi bencana alam kekeringan, butuh waktu yang cukup lama untuk melaksanakan mitigasi bencana alam di setiap wilayah yang mengalami kekeringan. Selain wilayahnya yang terpencil, akses jalan yang sempit dan rusak menghambat operasional BPBD untuk pendistribusian air ataupun melakukan sosialisasi melalui program DESTANA dan SPAB. Kemudian akibat wilayah yang mengalami kekeringan itu terpencil menyebabkan jaringan internet juga sulit terjangkau, hal tersebut menyebabkan BPBD terkendala dalam memberikan informasi terkait kekeringan kepada masyarakat yang memiliki alat media informasi. Selanjutnya berdasarkan keterangan salah satu warga yang bertempat tinggal di wilayah yang mengalami kekeringan, tepatnya di kecamatan yang mengalami kekeringan terluas yaitu Kecamatan Batuputih. Kondisi wilayah di Kecamatan Batuputih sangat menghambat pelaksanaan mitigasi bencana alam kekeringan, di wilayah yang menjadi penghasil batu kapur putih ini cenderung memiliki struktur tanah yang tidak seperti wilayah pada umumnya, struktur tanah di sana mengandung batu kapur yang cukup tebal sehingga menyebabkan sumber air yang terbatas. Selain itu, kondisi iklim dan cuacanya yang kering dan panas serta aktivitas produksi batu kapur dapat menyebabkan pencemaran air dan udara.

3.3 Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam Menghadapi Hambatan Penerapan Strategi Mitigasi Bencana Alam Kekeringan

a. Upaya Struktural

Upaya struktural merujuk pada tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah, dan meningkatkan sistem atau struktur sosial yang mendasari masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakselarasan dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sebuah sistem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah. Kompetensi suatu susunan organisasi tata kerja (SOTK) BPBD yang memiliki kemampuan koordinasi untuk menangani bencana dengan cepat, efektif, dan efisien, serta mampu melindungi masyarakat dari dampak bencana. Berdasarkan hambatan yang dialami BPBD dalam mitigasi bencana alam kekeringan di Kabupaten Sumenep, hal utama yang perlu diupayakan adalah memperbaiki, meningkatkan, dan memajukan kompetensi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumenep dalam rangka peningkatan kompetensi susunan organisasi tata kerja (SOTK) penulis menyimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut: 1) Pelatihan dan pengembangan, 2) pengembangan budaya organisasi budaya organisasi yang fokus pada tata kelola yang baik dan meningkatkan kompetensi organisasi, 3) Menyediakan sumber daya yang memadai, 4) menerapkan standar tata kelola yang baik, 5) Mempromosikan partisipasi karyawan.

b. Upaya Non Struktural

Selain upaya struktural, upaya yang dapat mengatasi atau menghadapi hambatan, masalah, ataupun kekurangan untuk menerapkan strategi BPBD dalam mitigasi bencana alam kekeringan di Kabupaten Sumenep yaitu upaya non struktural, upaya yang melalui unsur pendukung seperti anggaran, sarana, dan prasarana, sumber daya aparatur. Upaya non struktural yang dilakukan BPBD Kabupaten Sumenep sebagai berikut: 1) Melakukan training in house dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Sumenep, 2) Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka untuk meringankan anggaran dana yang dikeluarkan karena terbatasnya anggaran, selain itu, tujuan dari membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait yaitu untuk memperoleh bantuan prasarana lainnya dalam menanggulangi bencana.

c. Upaya Kelembagaan

Upaya Kelembagaan, adalah upaya yang melibatkan organisasi atau lembaga lainnya dengan serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja sebuah lembaga atau organisasi demi menyelesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan bersama. Upaya BPBD Kabupaten Sumenep dalam menghadapi berbagai macam hambatan melalui upaya kelembagaan dengan membangun sinergitas bersama lembaga masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Pendekatan dengan lembaga masyarakat, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan atau forum diskusi dengan lembaga masyarakat, RT, RW, Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperkenalkan program peningkatan kompetensi masyarakat tangguh bencana dan mensosialisasikan langkah-langkah untuk mendukung program tersebut, 2) Kampanye informasi, BPBD Kabupaten Sumenep melakukan kampanye informasi melalui pembuatan spanduk atau poster, untuk mempromosikan pentingnya penanggulangan bencana dan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan yang bertujuan mengurangi, menghindari, menghadapi, dan mencegah ancaman risiko dari bencana.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam rangka peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Sumenep ke arah yang lebih maju dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap BPBD dapat memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

a. Meningkatkan seluruh kompetensi anggota BPBD.

BPBD perlu berkoordinasi dengan BPKPSDM Kabupaten Sumenep supaya sumber daya aparatur yang ditempatkan di BPBD memiliki kompetensi mengenai kebencanaan atau paling tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti jurusan teknik sipil, geologi, meteorologi dan hidrometeorologi, teknik lingkungan, arsitektur, kesehatan masyarakat, ilmu komunikasi, psikologi, teknik informatika serta yang juga tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dengan memiliki sumber daya aparatur serta relawan yang berkompeten sesuai kebutuhan kebencanaan, mitigasi bencana terkhusus pada bencana alam kekeringan tidak hanya berfokus tindakan di lapangan, melainkan juga fokus dalam mitigasi dibalik layar seperti pengkajian risiko bencana alam kekeringan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, pemantauan cuaca dan iklim serta memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

Dalam hal ini BPBD perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau kualitas sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sistem ini akan membantu BPBD dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam

penanggulangan bencana sehingga BPBD dapat mengidentifikasi sarana dan prasarana apa yang perlu diperbaharui atau dilakukan pemeliharaan, misalnya pembaruan mobil tangki, mesin generator air, dan selang air serta pembaharuan gudang yang lebih besar. Selain itu BPBD juga harus memperhatikan dalam hal meningkatkan ketahanan pangan dan air melalui memperhatikan stok barang-barang logistik yang perlu disalurkan kepada korban yang terdampak bencana seperti sembako dan obat-obatan serta mengajak masyarakat untuk diversifikasi pertanian yaitu mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau ternak. Jika satu tanaman atau ternak mengalami kegagalan panen akibat cuaca buruk atau penyakit, variasi tanaman atau ternak lainnya dapat membantu menjaga pasokan pangan. Selain itu juga BPBD perlu mengajak masyarakat untuk memperluas sumber air dengan membangun sumur resapan.

c. Perencanaan anggaran yang tepat

Terkait dengan perencanaan anggaran penulis berharap BPBD mampu untuk menganalisis kebutuhan, menentukan prioritas, membuat rencana cadangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana alam kekeringan yang telah diterapkan di Kabupaten Sumenep sudah cukup baik, dilihat dari pola tujuan dan keputusan BPBD untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep dengan menciptakan masyarakat tangguh bencana, BPBD telah melaksanakan program yang menjadi skala prioritas yaitu program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana meskipun pada pelaksanaannya belum menyeluruh secara maksimal, program tersebut sudah cukup baik dalam mitigasi bencana alam kekeringan. Kebijakan BPBD untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan BPBD untuk memberikan pendistribusian air bersih, pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi kepada masyarakat. Dengan diterapkannya strategi tersebut melalui BPBD Kabupaten Sumenep, pemerintah telah mengimplementasikan amanat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Strategi tersebut juga menghasilkan sebuah pelayanan publik berbasis penanggulangan bencana yang di mana sesuai dengan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi perlindungan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dikatakan bahwa negara melalui pemerintah bertanggung jawab atas ancaman risiko bencana yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat selaku hak asasi manusia.

Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menerapkan Strategi Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumenep meliputi: 1) Komunikasi internal BPBD dalam berkoordinasi belum optimal, 2) Kualitas sumber daya yang belum memenuhi standar dalam menanggulangi bencana, 3) Kondisi wilayah kekeringan yang luas, terpencil, dan akses untuk operasional sulit, serta terdapat salah satu wilayah kekeringan dengan kondisi struktur tanah mengandung batu kapur putih yang menyebabkan sumber air yang sangat terbatas, 4) Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam Menghadapi Hambatan Penerapan Strategi Mitigasi Bencana Alam Kekeringan di antaranya sebagai berikut: 1) Melakukan peningkatan kompetensi pejabat struktural agar dapat menjadi contoh bagi anggota BPBD lainnya, 2) Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur secara rutin dan mandiri dengan memanfaatkan beberapa sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan lebih dari yang lainnya untuk dijadikan sebagai

pemandu atau pelatih, 3) Membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar dapat memudahkan BPBD Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi bencana melihat keterbatasan sumber daya yang dimiliki belum cukup memadai, 4) Meningkatkan sinergitas dengan lembaga masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu penelitian yang ringkas. Penelitian ini hanya dilaksanakan selama kurun waktu dua minggu, penulis hanya melakukan observasi dua kecamatan yang mengalami kekeringan di Kabupaten Sumenep.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa topik yang diangkat dan diteliti adalah penelitian baru sehingga penulis menyarankan agar pembaca dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan strategi BPBD dalam mitigasi bencana alam kekeringan di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur mendapatkan hasil penelitian atau temuan yang lebih baru dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama-tama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep beserta jajarannya yang telah memberikan ruang dan kesempatan penulis dalam rangka penelitian ini, dan juga seluruh pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan dan menyukseskan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bryson, John M. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 33rd ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26)*. Bandung: Alfabeta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *Pembukaan*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*.

SUMBER LAINNYA

- Hastuti, Dwi, and Chatarina Muryani. 2017. "Mitigasi Kesiapsiagaan, Dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bahaya Kekeringan, Kabupaten Grebongan (Implementasi Sebagai Modul Konstektual Pembelajaran Geografi SMA Kelas X Pokok Bahasa Mitigasi Bencana)". *Jurnal GeoEco* 3(1):47–57.
- Sutanto, Samuel Jonson. 2017. "Wawasan Mengenai Sistem Peringatan Dini Kekeringan Di Indonesia." *Jurnal Sumber Daya Air* 13(1):53. doi: 10.31028/jsda.v13.i1.53-68.
- Wulandari, Fajar. 2019. "Analisis Kesiapsiagaan Siswa Dalam Menghadapi Bencana Kekeringan Melalui Media Booklet". *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan* 15(1):65–74. doi: 10.32939/tarbawi.v15i1.

- Bnpb.go.id. 2022. *Potensi Ancaman Bencana* . <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>. Diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 14.15
- Ren, Fer. 2022. *BPBD Sumenep ajak Masyarakat Antisipasi Dini terjadinya Kekeringan*. <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/bpbd-sumenep-ajak-masyarakat-antisipasi-dini-terjadinya-kekeringan>. Diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 15.27
- Supriyatno, Helmi. 2021. *Kabupaten Sumenep Alami Bencana Kekeringan*. <https://www.harianbhirawa.co.id/kabupaten-sumenep-alami-kekeringan/>. Diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 20.10

